

Address : Tuesday Block No. 76 Rt/Rw
01/003 Jatitengah Village, Jatitujuh
District, Majalengka Regency, West Java


Email : arjijournal@gmail.com


Contact : 0821-4250-1527


Available at:

<https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI>

Volume 7 Number 4 Year 2025

 DOI : 10.61227

 E-ISSN : 2775-0787

 P-ISSN : 2774-9290



Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Disrupsi Digital dan AI

3551- 3568

Analysis of Islamic Education Policy in the Era of Digital Disruption and AI

Articles Submitted :

2025-10-30

Articles received :

2025-11-26

Published Articles :

2025-12-08

 Lailatusolihah^{1*}, Sutiah²

 ^{1,2} UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

 Email Correspondence : lailatusolihah06@gmail.com

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan Islam, Era Disrupsi Digital, dan AI

Abstrak: Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menciptakan disrupsi besar terhadap sistem pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang adaptif dan berbasis nilai agar pendidikan Islam tetap relevan dan berdaya saing tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah strategis dan rekomendasi kebijakan pendidikan Islam di era disrupsi digital dan AI dengan mengacu pada teori kebijakan publik (William Dunn, 2018). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Data yang digunakan berupa data sekunder, yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, kebijakan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu terkait pendidikan Islam dan transformasi digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah strategis kebijakan pendidikan Islam perlu difokuskan pada empat aspek utama, yaitu: transformasi digital berbasis nilai Islam, pemerataan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta integrasi kurikulum Islam berbasis *Society 5.0*. Sementara itu, rekomendasi kebijakan meliputi penyusunan regulasi etika digital Islami, pelaksanaan kebijakan yang inklusif dan desentralistik, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis

data, serta peningkatan riset dan inovasi pendidikan Islam digital. Kesimpulannya, kebijakan pendidikan Islam di era disrupsi digital harus bersifat progresif, normatif, partisipatif, dan evaluatif agar mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai moral dan spiritual Islam, sehingga dapat melahirkan masyarakat digital yang beradab, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman universal.

Keywords:

Islamic Education Policy, the Era of Digital Disruption, and AI

Abstract: *The development of digital technology and artificial intelligence (AI) has created major disruptions in the education system, including Islamic education. This situation demands adaptive and value-based policies so that Islamic education remains relevant and competitive without losing its spiritual identity. This study aims to analyze the strategic direction and policy recommendations for Islamic education in the era of digital disruption and AI, referring to public policy theory (William Dunn, 2018). The type of research used is descriptive qualitative with a literature study method. The data used is secondary data, obtained from books, scientific journals, government policies, and previous research results related to Islamic education and digital transformation. Data collection techniques were carried out through documentation and literature reviews, while data analysis was conducted through content analysis with a deductive approach. The research results indicate that the strategic direction of Islamic education policy needs to focus on four main aspects, namely: digital transformation based on Islamic values, equitable distribution of digital infrastructure, improving human resource competency, and integrating Islamic curriculum based on Society 5.0. Meanwhile, policy recommendations include the development of Islamic digital ethics regulations, the implementation of inclusive and decentralized policies, strengthening data-based monitoring and evaluation systems, and increasing research and innovation in digital Islamic education. In conclusion, Islamic education policy in the era of digital disruption must be progressive, normative, participatory, and evaluative in order to balance technological progress with Islamic moral and spiritual values, thereby creating a civilized, just, and digital society based on universal Islamic values.*


Copyright © 2025, Authors


This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0




This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-nonCommercial-shareAlike 4.0 International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Available at : <https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI>

 DOI : 10.61227

 P-ISSN : 2774-9290

 E-ISSN : 2775-0787



PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di era disrupsi menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional akibat kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Dalam situasi seperti ini, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan moral peserta didik agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Secara global, digitalisasi pendidikan agama kini menjadi prioritas utama untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan kehidupan modern yang kompleks, termasuk persoalan identitas keagamaan, keberagaman, serta dinamika sosial-keagamaan yang berkembang di ruang digital (Abas, 2025). Memasuki era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan baru yang memerlukan respons cepat dan tepat. Berbagai inovasi teknologi muncul di era ini, seperti *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data*, dan robotika. Era kontemporer ditandai dengan transformasi besar melalui Revolusi Industri 4.0 yang mengintegrasikan teknologi digital, IoT, AI, dan *Big Data* dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, konsep *society* 5.0 mengubah konsep teknologi *big data* yang dikumpulkan IoT dari AI menjadi media yang dapat membantu meningkatkan kehidupan manusia (Ratih et al., 2025).

Di Indonesia, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam perlu merumuskan strategi adaptasi terhadap Revolusi Industri 4.0 dan 5.0. Integrasi teknologi digital, pengembangan kompetensi digital, dan transformasi kurikulum menjadi prioritas utama. Selain itu, pendidikan Islam juga harus memperkuat perannya dalam pembentukan karakter sebagai penyeimbang terhadap dampak negatif kemajuan teknologi, seperti alienasi sosial dan erosi nilai moral. Menurut (Azyumardi Azra, 2017), secara historis pendidikan Islam telah menunjukkan fleksibilitas terhadap perkembangan zaman, namun akselerasi teknologi kontemporer menuntut respons yang lebih strategis. (Habibulloh & Ali, 2024) menegaskan bahwa hadirnya era otomatisasi menuntut pendidikan Islam mampu beradaptasi agar tidak tertinggal dari model pendidikan lain. Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki, pendidikan Islam diharapkan mampu memanfaatkan peluang di era digital ini.

Dalam konteks analisis kebijakan, Duncan MacRae (1976) dalam (Tilaar, 1994) menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dan fakta empiris untuk memecahkan masalah publik. Kebijakan, menurut (W. N. Dunn, 1999), merupakan serangkaian prinsip dan tindakan terencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu secara konsisten. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam harus dirancang dengan mempertimbangkan keterlibatan para pemangku kepentingan, kondisi lingkungan kebijakan, serta dinamika sosial dan teknologi yang berkembang. (Dye, 2017) juga menegaskan bahwa proses kebijakan tidak berhenti pada tahap implementasi, melainkan

mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan moral yang dihasilkan. Pendekatan Dye relevan untuk menjelaskan bagaimana keputusan pemerintah dan lembaga pendidikan Islam dalam merespons disrupsi digital mencerminkan pilihan politik dan moral tertentu. Sejalan dengan pendapat Dye (Anderson, 2023) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Ia menekankan bahwa kebijakan bukan hanya dokumen atau keputusan formal, tetapi juga meliputi apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam telah mulai menerapkan *e-learning*, pembelajaran daring atau *hybrid*, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses keagamaan dan pembelajaran. Transformasi digital juga mulai diterapkan melalui modul berbasis AI, sistem pembelajaran adaptif, serta manajemen lembaga berbasis digital. Sedangkan Tidak dapat dipungkiri hadirnya era otomatisasi ini menuntut pendidikan Islam mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri, agar tidak tertinggal jauh dari pendidikan model lainnya, pendidikan Islam dengan berbagai sumber daya yang ada diharapkan dapat memanfaatkan peluang di era sekarang ini (Habibulloh & Ali, 2024). (Zuhriyeh et al., 2025) menemukan bahwa modul ajar berbasis AI dalam pendidikan agama Islam mampu meningkatkan literasi digital keagamaan, motivasi belajar, keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta memperluas akses terhadap pengetahuan Islam secara lebih demokratis. Namun demikian, integrasi AI dalam pendidikan Islam masih tergolong rendah dan belum secara komprehensif diatur dalam kebijakan institusional.

Sementara itu, (Muslim, 2024) menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti AR dan AI dapat meningkatkan keterlibatan, aksesibilitas, dan interaktivitas dalam pendidikan Islam, tetapi juga menimbulkan risiko hilangnya nilai moral jika tidak dikelola secara bijaksana. (Istibana, 2025) menambahkan bahwa manajemen pendidikan Islam yang bertransformasi secara digital menghadapi berbagai tantangan, seperti pelatihan staf, keamanan data, dan kesenjangan akses teknologi. Di sisi lain, peluang yang terbuka mencakup akses pembelajaran yang lebih luas, inovasi metode pembelajaran, serta kolaborasi antar lembaga. (Fian Khofifatul, 2025) juga menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui pendekatan moderasi dan transformasi digital, meskipun masih terdapat kesenjangan implementasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif.

Melalui berbagai literatur di atas, dapat diidentifikasi bahwa kebijakan pendidikan Islam saat ini masih berorientasi pada paradigma tradisional dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tuntutan era digital dan kecerdasan buatan. Implementasinya sering terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, kompetensi guru, dan manajemen, serta adanya kesenjangan antara lembaga di perkotaan dan pedesaan. Minimnya kajian komprehensif menyebabkan arah kebijakan kurang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam agar pendidikan Islam menjadi lebih relevan di era disrupsi digital dan AI.

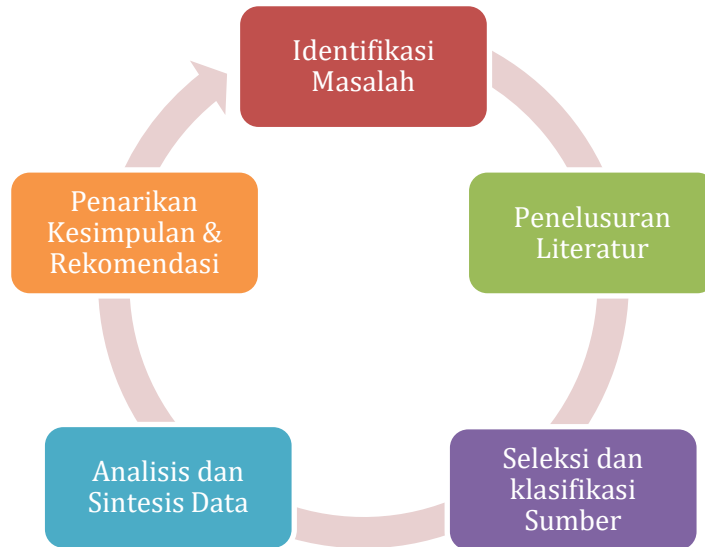
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis arah strategis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan Islam yang adaptif terhadap era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI). Secara khusus, penelitian ini berupaya: (1) mengidentifikasi tantangan dan peluang kebijakan pendidikan Islam di tengah perkembangan teknologi digital dan AI, (2) mendeskripsikan relevansi kebijakan pendidikan Islam dengan nilai-nilai dasar Islam seperti tauhid, akhlak, dan kemaslahatan umat, (3) menganalisis implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis digital dari perspektif teori kebijakan public (W. H. Dunn, 2018), serta (4) menyusun arah strategis dan rekomendasi kebijakan yang progresif, normatif, partisipatif, dan evaluatif bagi pengembangan pendidikan Islam di era disrupsi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami, menafsirkan, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah secara mendalam terkait kebijakan pendidikan Islam dalam konteks era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pihak lain, misalnya berupa dokumen atau laporan penelitian. Data primer diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah dari rentan waktu 2020-2025 dengan total sekitar 16 jurnal yang memuat kajian tentang kebijakan pendidikan Islam dan integrasi teknologi. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku-buku teori pendidikan Islam, laporan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan sumber akademik daring yang kredibel seperti *Google Scholar*, *ResearchGate*. Dengan demikian, lokasi penelitian tidak berbentuk tempat fisik, melainkan ruang digital dan repositori ilmiah tempat literatur tersebut diakses.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis, dimulai dari: (1) identifikasi masalah untuk menentukan fokus kajian terkait kebijakan pendidikan Islam dalam konteks disrupsi digital; (2) penelusuran literatur dengan meneliti berbagai sumber ilmiah yang relevan; (3) klasifikasi dan seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran; (4) analisis dan sintesis data dengan membaca secara mendalam dan mengelompokkan hasil kajian berdasarkan tema; dan (5) penarikan kesimpulan yang mengaitkan hasil sintesis literatur dengan teori dan arah kebijakan pendidikan Islam.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran sumber-sumber ilmiah menggunakan aplikasi *Google Scholar*, *ResearchGate*. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis isi digunakan untuk menemukan pola, ide utama, dan keterkaitan antar konsep dalam literatur yang dikaji, sedangkan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menafsirkan hasil temuan secara mendalam dan menyusunnya menjadi kerangka konseptual yang utuh. Dengan metode *library research* ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan argumentatif mengenai arah kebijakan pendidikan Islam yang adaptif terhadap disrupsi digital dan kecerdasan buatan, serta tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman yang holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari contoh tabel artikel terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Artikel Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Jurnal / Sumber	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	(Abas, 2025)	Transformasi Pembelajaran PAI dengan AI (studi SMA Manbaul Ulum)	Arji - Action Research Journal Indonesia.	Pemanfaatan AI pada pembelajaran PAI	AI meningkatkan akses & pembelajaran, namun butuh

					etika dan pendampingan.
2	(Sholeh, 2023)	Technology Integration in Islamic Education	Journal of Modern Islamic Studies and Civilization	Integrasi teknologi dalam kebijakan pendidikan Islam	Digitalisasi memperluas akses & efektivitas pembelajaran.
3	(Sumiati et al., 2024)	Transformasi of Higher Education	Al-Hayat: Journal of Islamic Education	Transformasi kebijakan pada perguruan tinggi Islam	LMS & kolaborasi digital memperkuat inovasi akademik; tantangan kapasitas SDM.
4	(Muslim, 2024)	Internalising Digital Technology in Islamic Education	Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme	Integrasi nilai Islam dalam teknologi	Pentingnya etika digital berbasis spiritualitas Islam; risiko etis.
5	(Fian Khofifatul, 2025)	Islamic Education in Indonesia in a Global Context	International Journal of Social Science and Human Research	Moderasi dan digitalisasi pendidikan Islam	Transformasi digital yang berbasis moderasi beragama; posisi global pendidikan Islam.
6	(Suhendi, 2024)	Islamic Education Curriculum in the Era of Society 5.0	International Journal of Science and Society	Kurikulum Islam & Society 5.0	Integrasi AI dan spiritual intelligence dalam kurikulum.
7	(Rois, 2025)	AI-Driven Innovation in Islamic Schools	Al-Abshar: Journal of Islamic Education Management	Penerapan AI di sekolah Islam	AI meningkatkan efisiensi & akses; perlunya regulasi etika.

8	(Zuhriyah et al., 2025)	Digital Transformation of Islamic Education (AI module)	Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan	Jurnal Pengembangan modul ajar berbasis AI	Pengembangan modul ajar berbasis AI	Modul AI meningkatkan literasi digital keagamaan & motivasi belajar.
9	(Jannah, 2023)	Manajemen Pendidikan Islam dalam Konteks Teknologi Digital	Jurnal Cahaya Mandalika	Manajemen lembaga Islam digital	Manajemen lembaga Islam digital	Tantangan SDM, keamanan data, kepemimpinan digital dalam manajemen Pendidikan Islam, Kebutuhan transformasi manajerial.
10	(Habibulloh & Ali, 2024)	Strategi Pendidikan Islam di Era Digital	JMPI: Jurnal Manajemen, Pendidikan & Pemikiran Islam	Jurnal & adaptasi lembaga Islam	Strategi adaptasi lembaga Islam	Perlu keseimbangan nilai Islam, kemajuan teknologi, dan konsep adaptasi lembaga berbasis kebijakan digital.
11	(Istibana, 2025)	Digital Transformation in Islamic Philanthropy	Journal of Islamic Studies	Filantropi Islam & digitalisasi	Filantropi Islam & digitalisasi	Transparansi meningkat (mis. blockchain); peluang & tantangan manajerial.
12	(Muh. Akhyar Al Haris, dkk., 2025)	Penguatan Pendidikan Moderasi Beragama	J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah	Moderasi beragama di era digital	Moderasi beragama di era digital	Strategi membangun generasi toleran &

					inklusif di era disrupsi.
13	(Ratih et al., 2025)	[Jurnal Edukasi dan Literasi Pendidikan]	Jurnal Edukasi dan Pendidikan	Literasi Pendidikan dan tantangan pembelajaran digital pada era Society 5.0.	Literasi digital membantu meningkatkan kemampuan belajar abad 21, namun membutuhkan keterampilan berpikir kritis & pemanfaatan teknologi secara tepat.
14	(Sutiah, 2021)	Pengembangan Media Video Animasi Berbasis Canva	Jurnal BasicEdu	Media pembelajaran digital & motivasi	Video animasi (Canva) efektif meningkatkan motivasi & prestasi belajar.
15	(Azyumar di Azra, 2017)	Pendidikan Islam Di Era Globalisasi: Peluang Dan Tantangan.	<i>Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan</i>	Pendidikan Islam di era globalisasi.	Pendidikan Islam perlu adaptif terhadap modernitas dan teknologi agar tetap relevan tanpa kehilangan identitas spiritual.
16	(Fatmariyanti & Fauzi, 2023)	Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi	<i>Journal Of Humanities And Social Studies</i>	Analisis teori kebijakan publik William Dunn dalam implementasi kebijakan pendidikan.	Kebijakan pendidikan harus melalui evaluasi menyeluruh dan berbasis data agar sesuai konteks sosial termasuk digitalisasi

Dari tabel di atas, hasil kajian pustaka menunjukkan tiga pola utama dalam arah kebijakan dan praktik pendidikan Islam di era digital:

1. Transformasi Digital Pendidikan Islam Semakin Meluas dan Inklusif. Didukung oleh peneliti (Sholeh, 2023, Sumiati et al., 2024, Abas, 2025, Fian Khofifatul, 2025, Rois, 2025) Pendidikan Islam mengalami perluasan digitalisasi melalui LMS, e-learning, penggunaan AI dalam kelas, dan modul digital. Tren ini menunjukkan bahwa pembelajaran digital dilakukan pada semua level: sekolah Islam, madrasah, hingga perguruan tinggi.
2. Integrasi Nilai, Etika, dan Spiritualitas Islam dalam Teknologi Digital. Dalam penelitian (Fian Khofifatul, 2025, Muslim, 2024, Suhendi, 2024, Rois, 2025) Teknologi tidak dibiarkan netral tetapi dipandu oleh *Islamic digital ethics*, spiritual intelligence, dan etika bermedia. *Trend* nya Perumusan kerangka etik digital Islami sebagai landasan pemanfaatan AI.
3. Pergeseran Kebijakan ke Arah Data-Driven, AI-Based, dan Society 5.0. Peneliti (Suhendi, 2024, Zuhriyeh et al., 2025, Ratih et al., 2025, Fatmariyanti & Fauzi, 2023). Kebijakan pendidikan Islam bergeser dari pendekatan tradisional menuju pengambilan keputusan berbasis data, AI, dan teknologi cerdas. Menjadi *trend* baru bahwa kurikulum berbasis *Society* 5.0 mulai menjadi arah dominan.
4. Penguatan Moderasi Beragama Berbasis *Platform* Digital. Didukung oleh: (Fian Khofifatul, 2025, Muh. Akhyar, et al., 2025) Teknologi digunakan sebagai media untuk penyebaran moderasi, toleransi, dan literasi keagamaan yang damai. Ruang digital menjadi arena baru pembinaan moderasi beragama.
5. Tantangan SDM, Infrastruktur, dan Kepemimpinan Digital Masih Dominan. Peneliti seperti (Jannah, 2023, Ratih et al., 2025, Sumiati et al., 2024). Menegaskan bahwa hambatan terbesar transformasi digital adalah rendahnya literasi digital guru, lemahnya kepemimpinan digital, keterbatasan sarana-prasarana. Tren ini menjadi Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (digital upskilling).
6. AI sebagai Penggerak Utama Inovasi Pembelajaran dan Manajemen. Didukung Didukung oleh (Abas, 2025, Rois, 2025, Zuhriyeh et al., 2025). AI digunakan untuk personalisasi pembelajaran, peningkatan efisiensi, monitoring perkembangan peserta didik, perancangan modul PAI berbasis AI. Menjadikan tren AI mulai menjadi *core technology* dalam pendidikan Islam.
7. Pengembangan Media Pembelajaran Digital dan Peningkatan Motivasi Belajar. Didukung oleh: (Sutiah, 2021, Zuhriyeh et al., 2025, Ratih et al., 2025). Media pembelajaran seperti video animasi Canva dan modul AI terbukti meningkatkan motivasi, minat belajar, literasi digital. Tren nya yakni Media digital kreatif menjadi standar baru pembelajaran.

8. Modernisasi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Penelitian yang dilakukan (Jannah, 2023, Sumiati et al., 2024, Istibana, 2025). Menemukan bahwa manajemen pendidikan Islam berkembang melalui: tata kelola digital, transparansi berbasis teknologi (*blockchain*), optimalisasi data. Tren ini menunjukkan manajemen lembaga Islam bergeser ke arah *e-governance* dan *digital governance*.
9. Adaptasi Globalisasi dan Reposisi Pendidikan Islam di Era Modern. Sebagian penelitian menyoroti (Azyumardi Azra, 2017, Fian Khofifatul, 2025). Pendidikan Islam harus adaptif terhadap modernitas dan digitalisasi, tetapi tetap mempertahankan identitas spiritual. Menyebabkan tren reposisi pendidikan Islam sebagai sistem yang relevan secara global.

PEMBAHASAN

Transformasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era Disrupsi Digital

Kebijakan pendidikan Islam pada era disrupsi digital mengalami transformasi signifikan, ditandai dengan pergeseran paradigma dari sistem pembelajaran tradisional menuju kebijakan berbasis digital dan teknologi cerdas. Menurut (Sholeh, 2023) integrasi teknologi dalam pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan visi pendidikan Islam yang adaptif dan inovatif. Pemerintah dan lembaga pendidikan Islam kini dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kemajuan teknologi informasi tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual dan karakter keislaman. Sejalan dengan hal tersebut, (Sumiati et al., 2024) menjelaskan bahwa transformasi digital di perguruan tinggi Islam mencakup perubahan kebijakan dalam tata kelola lembaga, sistem pembelajaran berbasis *Learning Management System (LMS)*, serta kolaborasi dengan sektor industri digital. Transformasi ini juga menuntut kebijakan yang memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, literasi digital, serta pembentukan budaya akademik baru yang terbuka terhadap inovasi. Pendidikan Islam sebagai proses perubahan perilaku yang terjadi pada individu dan masyarakat, yang dapat dirancang untuk mengembangkan potensi manusia dengan berpegang pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam menekankan pada pencarian ilmu, penguasaan, dan pengembangan berdasarkan ibadah kepada Allah SWT (Jannah, 2023)

Pada era digital ini, pemanfaatan teknologi dan media digital telah menjadi elemen penting dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu bentuk media yang efektif dan menarik dalam menyampaikan materi adalah video animasi, karena mampu menyajikan informasi secara visual dan interaktif sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Di sisi lain, Canva merupakan aplikasi desain grafis yang banyak digunakan karena tampilannya yang intuitif serta fiturnya yang beragam, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan konten visual yang kreatif dan menarik dengan cara yang sederhana namun profesional (Sutiah, 2021). Kebijakan digitalisasi pendidikan Islam berperan penting dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Dari sudut pandang kebijakan publik, (W. N. Dunn, 2017) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan

serangkaian keputusan interdependen yang dibuat oleh aktor publik untuk merespons isu tertentu secara rasional dan berorientasi hasil. Maka, kebijakan pendidikan Islam dalam konteks disrupsi digital perlu didesain secara sistemis, berbasis data (*data-driven policy*), dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat muslim modern yang dinamis.

Sejalan dengan (Fian Khofifatul, 2025) menegaskan bahwa transformasi digital di lembaga Islam Indonesia tidak hanya bertujuan memperluas akses, tetapi juga memperkuat posisi pendidikan Islam dalam percaturan global berbasis moderasi dan kemanusiaan universal. Dengan demikian, arah kebijakan pendidikan Islam di era disrupsi digital menuntut keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pemeliharaan nilai-nilai Islam yang humanistik.

Relevansi Kebijakan terhadap Nilai-nilai Islam

Kebijakan pendidikan Islam yang dikembangkan pada era digital tidak boleh terlepas dari nilai-nilai dasar Islam seperti tauhid, akhlak, dan kemaslahatan umat (*masalah al-'ammah*). Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak sekadar berfungsi mentransfer ilmu, melainkan juga menanamkan nilai moral dan spiritual dalam setiap kebijakan pembelajaran berbasis teknologi. Menurut (Fian Khofifatul, 2025) transformasi digital pendidikan Islam harus dibingkai dalam semangat moderasi beragama agar teknologi tidak menjadi sarana yang menjauhkan manusia dari nilai ketuhanan. Moderasi menjadi prinsip dasar dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan spiritualitas, antara rasionalitas dan moralitas.

Sementara itu, (Muslim, 2024) menegaskan bahwa penerapan teknologi seperti *Augmented Reality (AR)* dan *Artificial Intelligence (AI)* dalam pendidikan Islam mampu memperkuat literasi digital keagamaan sekaligus memperkaya pengalaman spiritual peserta didik. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan pendidikan mengatur integrasi nilai-nilai Islam dalam desain teknologi yang digunakan. Kebijakan yang selaras dengan nilai Islam juga ditunjukkan oleh (Suhendi, 2024) yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam di era *Society 5.0* harus menggabungkan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*). Relevansi kebijakan pendidikan Islam terhadap nilai Islam juga dapat dilihat dari perspektif (W. N. Dunn, 2017) yang menekankan pentingnya *policy evaluation* untuk memastikan kebijakan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga etis secara sosial dan moral. Teknologi digital, terutama media sosial dan aplikasi mobile, memfasilitasi penerapan nilai-nilai keagamaan yang dinamis dan kontekstual, sehingga menuntut pendekatan pendidikan keagamaan yang adaptif dan inovatif (Muh. Akhyar Al Haris., dkk, 2025)

Hal ini berarti, kebijakan digitalisasi pendidikan Islam bukan hanya menekankan pada kompetensi digital, tetapi juga pada pembentukan akhlak mulia dan kesadaran religius. Dengan demikian, relevansi kebijakan pendidikan Islam di era digital terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara inovasi dan moralitas.

Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek struktural, kultural, maupun sumber daya manusia. (Sholeh, 2023) menemukan bahwa hambatan utama terdapat pada kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, terutama antara lembaga pendidikan di kota dan di daerah pedesaan. Keterbatasan jaringan internet, perangkat pembelajaran, dan kapasitas teknis guru menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi madrasah. (Rois, 2025) berpendapat bahwa AI berkontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran, kontekstualisasi materi, dan kolaborasi global antar lembaga pendidikan Islam, Namun demikian, muncul sejumlah persoalan etis seperti kesesuaian konten AI dengan ajaran Islam, privasi data, potensi dehumanisasi dalam proses belajar, serta bias algoritmik.

Menurut (Sumiati et al., 2024) sebagian besar lembaga pendidikan Islam belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan sistem pembelajaran digital, seperti *LMS*, *learning analytics*, dan teknologi berbasis AI. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan tanpa diimbangi peningkatan kapasitas manusia justru berpotensi menimbulkan kesenjangan baru antara kebijakan dan praktik lapangan. Selain faktor teknis, (Muslim, 2024) menyoroti munculnya tantangan etis dalam penerapan teknologi di pendidikan Islam, seperti plagiarisme digital, penyalahgunaan AI, dan menurunnya kepekaan spiritual akibat ketergantungan terhadap teknologi. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi harus mencakup aspek etika digital dan pembinaan moral agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab.

Menurut (Gall, M. D. dkk 1996) keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kesiapan sistem, sumber daya, dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses inovasi. Mereka menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan pendidikan harus melalui tahapan *research and development* (R&D) yang melibatkan uji coba lapangan dan penyesuaian kontekstual. Dalam konteks pendidikan Islam, ini berarti kebijakan digitalisasi harus melalui proses evaluatif agar tidak sekadar meniru sistem teknologi modern tanpa adaptasi nilai keislaman. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam yang efektif membutuhkan strategi yang mencakup penyediaan infrastruktur, peningkatan literasi digital pendidik, dan penguatan nilai spiritual dalam setiap aktivitas digital di lingkungan pendidikan.

Arah Strategis dan Rekomendasi Kebijakan

Mengacu pada teori kebijakan publik William N. Dunn (2018) dalam (Fatmariyanti & Fauzi, 2023) arah strategis kebijakan pendidikan Islam di era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI) harus berlandaskan analisis yang komprehensif, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Pendidikan Islam dituntut untuk memadukan dimensi keilmuan, teknologi, dan nilai spiritual secara seimbang agar mampu beradaptasi tanpa kehilangan karakter keislamannya.

Transformasi digital dalam pendidikan Islam menuntut perubahan paradigma dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi yang tetap menjunjung etika dan nilai-nilai Islam. Teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data*, dan *Internet of Things (IoT)* perlu dimanfaatkan bukan sekadar sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana memperkuat moral dan akhlak peserta didik. Sebagaimana ditegaskan (Muslim, 2024) pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam harus berorientasi pada *maslahah al-'ammah* atau kemaslahatan umat, bukan sekadar efisiensi teknis. Arah kebijakan berikutnya menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur digital agar seluruh lembaga pendidikan Islam termasuk di daerah 3T, memiliki akses setara terhadap teknologi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperluas jaringan internet, menyediakan perangkat digital, serta membangun ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Sholeh, 2023).

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam keberhasilan transformasi ini. Guru, dosen, dan tenaga kependidikan perlu memiliki literasi digital yang kuat dan etika penggunaan teknologi yang berlandaskan nilai Islam (Sumiati et al., 2024). Proses ini sejalan dengan konsep *policy process* Dunn yang menekankan pentingnya sosialisasi dan internalisasi nilai dalam setiap kebijakan. Pada tataran kurikulum, pendidikan Islam perlu diarahkan menuju model *Society 5.0*, yaitu sistem pembelajaran yang mengintegrasikan kecerdasan digital dengan kecerdasan spiritual. Seperti disampaikan (Suhendi, 2024) pendidikan Islam di masa depan harus melahirkan manusia cerdas secara intelektual, berkarakter, dan religius.

Berdasarkan arah tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dikembangkan. Pertama, kebijakan pendidikan Islam harus bersifat inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, industri digital, dan akademisi (Fian Khofifatul, 2025). Kedua, perlu dibentuk regulasi etika digital berbasis nilai-nilai Islam untuk mengarahkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan bermoral (Muslim, 2024 dan Azyumardi Azra, 2017). Ketiga, kebijakan digitalisasi harus bersifat desentralistik dan memberi otonomi kepada madrasah maupun pesantren agar dapat menyesuaikan implementasi sesuai konteks lokal (Rian. N.D, 2017).

Selanjutnya, sistem monitoring dan evaluasi kebijakan berbasis data digital perlu dikembangkan untuk menilai efektivitas dan kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai Islam (Fatmariyanti & Fauzi, 2023). Selain itu, lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat riset dan inovasi digital, seperti pengembangan AI Islami, pembelajaran adaptif, dan *spiritual intelligence-based learning* (Sutiah, 2021). Secara konseptual, integrasi teori (W. N. Dunn, 2017) dengan praktik kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa arah dan rekomendasi kebijakan harus bersifat progresif, dengan teknologi sebagai katalis inovasi; normatif, berlandaskan nilai Islam sebagai pedoman moral; partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; serta evaluatif, melalui sistem penilaian yang berkelanjutan.

Dengan arah kebijakan yang demikian, pendidikan Islam tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global, tetapi juga berperan sebagai

penuntun moral dalam membangun masyarakat digital yang beradab, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman secara umum.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi teoretis hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori kebijakan publik dalam konteks pendidikan Islam di era disrupsi digital dan Artificial Intelligence (AI). Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori analisis kebijakan publik (W. H. Dunn, 2018) dalam menjelaskan proses perumusan dan evaluasi kebijakan yang berbasis data dan nilai. Penelitian ini menunjukkan bahwa model kebijakan publik tidak hanya perlu mempertimbangkan dimensi rasional-empiris, tetapi juga dimensi normatif-spiritual, terutama dalam sistem pendidikan yang berlandaskan nilai keislaman. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman teori kebijakan publik ke arah yang lebih holistik dan kontekstual terhadap nilai-nilai Islam, etika digital, serta kemaslahatan sosial (*maslahah al-'ammah*).

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan strategis bagi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan Islam, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai Islam dalam setiap tahap kebijakan digitalisasi pendidikan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya pelatihan literasi digital bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan agar mampu memanfaatkan teknologi seperti *Artificial Intelligence*, *Learning Management System* (LMS), dan *Big Data* secara etis dan efektif. Implementasi praktis lainnya adalah perlunya penguatan infrastruktur digital dan penyusunan regulasi etika digital Islami untuk memastikan bahwa transformasi pendidikan Islam berlangsung adil, berkeadilan, dan selaras dengan nilai spiritualitas Islam.

Refleksi

1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara akademik. Pertama, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang bergantung sepenuhnya pada sumber-sumber sekunder. Dengan demikian, hasil analisis lebih bersifat konseptual dan teoritik daripada empiris. Kedua, sebagian besar literatur yang dianalisis berfokus pada konteks pendidikan Islam di Indonesia, sehingga generalisasi hasil penelitian terhadap konteks global atau regional lain masih terbatas. Ketiga, karena perkembangan teknologi digital dan AI berlangsung sangat cepat, ada kemungkinan bahwa sebagian data dan literatur yang digunakan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi terkini pada saat artikel ini diterbitkan. Keempat, penelitian ini belum secara spesifik membedah implementasi kebijakan pendidikan Islam digital pada level lembaga (madrasah, pesantren, atau perguruan tinggi Islam) secara mendalam, sehingga ruang untuk analisis empiris masih terbuka lebar.

2. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan arah bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas dan memperdalam kajian ini:

- a. Eksplorasi Empiris di Lembaga Pendidikan Islam, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan lapangan (*field research*) untuk menganalisis bagaimana kebijakan digitalisasi pendidikan Islam diimplementasikan di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, termasuk hambatan dan strategi adaptasinya.
- b. Pengembangan Model Kebijakan Pendidikan Islam Digital Berbasis AI, Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model atau kerangka kerja kebijakan yang mengintegrasikan *Artificial Intelligence*, *Big Data*, dan *Internet of Things* (IoT) dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan kemaslahatan.
- c. Analisis Perbandingan Antar negara, Studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara lain dengan sistem pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara kritis menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di era disrupsi digital dan *Artificial Intelligence* (AI) menuntut adanya perubahan paradigma dari pendekatan tradisional menuju sistem kebijakan yang berbasis nilai, data, dan teknologi. Berdasarkan analisis teori kebijakan publik (William Dunn, 2018), proses kebijakan pendidikan Islam tidak cukup berhenti pada perumusan normatif, tetapi harus meliputi implementasi, evaluasi, dan pembaruan kebijakan secara berkelanjutan agar tetap adaptif terhadap dinamika digital yang sangat cepat.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama kebijakan pendidikan Islam terletak pada kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi pendidik, serta lemahnya regulasi etika digital Islami. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diiringi kesiapan struktural dan kultural lembaga pendidikan Islam. Meskipun demikian, terdapat peluang besar bagi pendidikan Islam untuk memimpin arah kebijakan pendidikan berbasis nilai moral, spiritual, dan kemaslahatan sosial (*maslahah al-'ammah*) jika mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan teknologi modern.

Kedua, arah strategis kebijakan pendidikan Islam yang ideal harus mencerminkan keseimbangan antara rasionalitas teknologi dan spiritualitas Islam. Integrasi *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data*, dan *Internet of Things* (IoT) harus diarahkan tidak hanya untuk efisiensi administratif, tetapi juga untuk memperkuat karakter dan nilai religius peserta didik. Kebijakan pendidikan Islam di era *Society* 5.0 perlu mengedepankan model pembelajaran yang humanis-digital, di mana teknologi berfungsi sebagai fasilitator moral dan bukan pengganti nilai-nilai kemanusiaan.

Ketiga, secara normatif dan praktis, kebijakan pendidikan Islam di era disrupsi digital perlu bersifat progresif, partisipatif, dan evaluatif. Progresif berarti berani berinovasi dengan teknologi baru tanpa kehilangan identitas keislaman; partisipatif

berarti melibatkan seluruh pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, pendidik, dan masyarakat dalam setiap proses kebijakan; sedangkan evaluatif berarti kebijakan harus terus ditinjau dengan pendekatan berbasis data dan etika Islam agar tetap relevan dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam di era digital harus berfungsi sebagai panduan moral bagi transformasi teknologi, bukan sekadar sebagai respon administratif terhadap perubahan zaman. Pendidikan Islam harus tampil sebagai pelopor dalam membangun ekosistem digital yang beradab, berkeadilan, dan bernilai spiritual tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pijakan konseptual bagi pengembangan teori kebijakan publik berbasis nilai Islam serta arah praktis bagi pembuat kebijakan untuk membangun masa depan pendidikan Islam yang inklusif, adaptif, dan bermartabat di tengah gelombang disrupsi teknologi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, S. (2025). Transformasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbantuan Artificial Intelligence di Era Digital (Studi Kasus di Sekolah SMA Manbaul Ulum). *ARJI Action Research Journal Indonesia*, 7(76), 2427–2440. <https://doi.org/https://doi.org/10.61227/arji.v7i3.546>
- Anderson, J. E. (2023). *Public Policymaking* (ke 9). Cengage Learning, Boston.
- Azyumardi Azra. (2017). PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI: PELUANG DAN TANTANGAN. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 6(4), 123–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.32729/edukasi.v6i4.269>
- Dunn, W. H. (2018). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis An Integrated Approach*. New York: Roulledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (edisi ke 1). New York: Pearson.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Fian Khofifatul, M. R. (2025). Islamic Education in Indonesia in a Global Context: Perspectives on Moderation and Digital Transformation of Artificial Intelligence. *International Journal of Social Science and Human Research*, 08(09), 7004–7013. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i9-33>
- Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (1996). *Educational research: An introduction (6th ed.)* (6th. Ed). Longman Publishing.
- Habibulloh, M., & Ali, H. (2024). Strategi Pendidikan Islam di Era Digital. *JMPI: Jurnal Manajemen, Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 70–88. <https://doi.org/10.71305/jmpi.v2i2.27>

- Istibana, M. S. (2025). Digital Transformation in Islamic Philanthropy: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Studies*, 18(1), 44–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.61987/sedu.v1i1.000>
- Jannah, R. (2023). MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS TEKNOLOGI DIGITAL. *Jurnal Cahaya MANDALIKA*, 4(2), 435–443. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2>
- Muh. Akhyar Al Haris All1, Nurul Dwiayu S, Firdaus W. Suhaeb, I. I., & Idrus. (2025). Penguatan Pendidikan Moderasi Beragama : Strategi Membangun Generasi Muda yang Toleran dan Inklusif di Era Disrupsi Digital. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 670–680. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8789>
- Muslim, M. (2024). Internalising Digital Technology in Islamic Education. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 6(3), 180–197. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v6i3.6309>
- Ratih, R., Dermawan, N. S., & Setiaji, A. (2025). Jurnal Edukasi dan Literasi Pendidikan. *Jurnal Edukasi dan Literasi Pendidikan*, 6(3), 17–25. <https://doi.org/10.36232/pendidikan.v11i1.3207.2>
- Rian. N.D. (2017). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rois, A. (2025). Ai-Driven Innovation In Islamic Schools: Impacts, Opportunities And Ethical Challenges. *Al-Abshar: Journal of Islamic Education Management*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58223/al-abshar.v4i1.467>
- Sholeh, M. I. (2023). Technology Integration in Islamic Education: Policy Framework and Adoption Challenges. *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*, 1(02), 82–100. <https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.155>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, S. (2024). Islamic Education Curriculum in the Era of Society 5.0: Between Challenges and Innovation. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 874–888. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1073>
- Sumiati, E., Sutrisno, Sibawaihi, & Tekke, M. (2024). Transformation of Islamic Higher Education: Policy Strategy, Challenges, and Opportunities. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(4), 1399–1417. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i4.46>
- Sutiah, A. Y. (2021). Pengembangan Media Video Animasi Berbasis Aplikasi Canva untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2384–2394. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1237>
- Tilaar, A. S. dan H. A. R. (1994). *Analisis Kebijakan Pendidikan Sebuah Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.
- Zuhriyeh, S., Ali, M., & Hidayat, A. (2025). Digital Transformation of Islamic Education: An Artificial Intelligence-Based Teaching Module Development Study. *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(2), 1113–1126. <https://doi.org/10.51276/edu.v6i2.1255>